

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PSBB DALAM MENANGANI
PANDEMIK COVID-19 (PP NO. 21 TAHUN 2020)
DI TINJAU DARI PERSPEKTIVE
FIQH SIYASAH**

Oleh :
MUHAMMAD AZMI AZHARY BATUBARA
NIM. 0203173144



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PSBB DALAM MENANGANI
PANDEMIK COVID-19 (PP NO. 21 TAHUN 2020)
DI TINJAU DARI PERSPEKTIVE FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah pada

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

MUHAMMAD AZMI AZHARY BATUBARA

NIM. 0203173144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azmi Azhary Batubara

NIM : 0203173144

Prodi : Hukum Tata Negara Islam (siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PSBB DALAM
MENANGANI PANDEMIK COVID-19 (PP NO. 21 TAHUN 2020)
DI TINJAU DARI PERSPEKTIVE FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatian dan kebijakan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN, 15 September 2022



Muhammad Azmi Azhary Btr.
NIM. 0203173144

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PSBB DALAM MENANGANI
PANDEMIK COVID-19 (PP NO. 21 TAHUN 2020)
DI TINJAU DARI PERSPEKTIVE FIQH SIYASAH**

Oleh :

Muhammad Azmi Azhary Btr
NIM. 0203173144

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Fatimah, S.Ag. MA
NIP.19710320 199703 2 003

PEMBIMBING II



Ramadani, MII
NIP.19910921 201903 1 017

Mengetahui,

Ketua Prodi Siyasa



Dr. Irwansyah, MII
NIP.19801011 201411 1002

IKHTISAR

Penelitian ini diangkat oleh penulis dilatarbelakangi banyaknya kritikan yang ditujukan oleh sejumlah ahli hukum terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah ini menuai kritikan karena dinilai terlalu minimalis dan kurang memperhatikan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. Juga dalam penelitian ini Penulis. Tujuan Penelitian ini merupakan Penyajian Analisis Yuridis terhadap Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang PSBB ini yang mana dalam penelitian ini bertujuan mencari ketidaksesuaian pembentukan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 Tentang PSBB, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Serta bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam meninjau ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah yang memiliki amanat Undang-Undang dalam Hierarkinya, Dan dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan *Fiqh Siyasah*. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis bahan hukum Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis yakni interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung, serta Metode *fiqh siyasah* menggunakan teori *Al-sulthah al-Tasri'iyah*. Hasil Analisis yuridis penelitian ini yang pertama adalah, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) memiliki sejumlah ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mana ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi apakah alasan pembentukannya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang induknya atau untuk melaksanakan Undang-Undang induknya. adanya ketidaksesuaian mengakibatkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 memenuhi Syarat Formil dan materil. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, dan 2. Tinjauan dengan *fiqh siyasah dusturiyah* dikarenakan *al-sultahah al-tanfidiyah* (kekuasaan eksekutif) sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang tidak boleh membuat suatu kebijakan yang bertentangan/sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh *al-sultahah altashri'iyah* (kekuasaan legislatif) sebagai lembaga pembuat undang-undang.

Kata Kunci : Kebijakan, Pembentukan, PSBB, Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada peneliti, dan dengan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya.

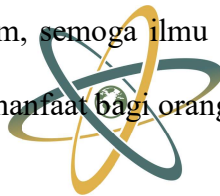
Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan safaatnya dihari akhir nanti. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) dalam prodi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan moril ataupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Almarhumah Ibundaku Nur Kholidah Matondang, yang setiap harinya ku rindukan, penyemangat sedih dan lelah ku, semoga kita berkumpul di *Jannah*-Nya yang sama-sama kita nantikan suatu hari nanti, Ayahku Drs. Anas Suaidi Batubara Pria tersabar yang pernah Penulis kenal dalam hidup, Semoga mencapai gelar ini adalah kado terindah dan amanat terakhir Ibuku yang bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi Ayah dan Ibu, serta berguna bagi banyak orang.
2. Bapak Prof. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Dr. Irwansyah, MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan serta bimbingan agar terselesainya skripsi ini sesuai aturan yang berlaku
5. Ibu Sofiaty Lubis, SH, MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) telah memberikan arahan serta bimbingan agar terselesainya skripsi ini sesuai aturan yang berlaku.
6. Ibu Dr. Fatimah, S.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ramadani, MH selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Deasy Yunita Siregar, M.Pd selaku Penasihat Akademik (PA) yang telah mengarahkan, memberi saran dan membimbing peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kepada Saudara sekandung Abangku Briptu Muhammad Rizky Ananda Batubara, S.H, Adikku Muhammad Khairi Dahlan Batubara (calon S,Pd) yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan dan Doa-nya Kepada Penulis.

10. Kepada Adinda Siti Indarwati, S.H, orang yang berpengaruh dalam memberikan dukungan dan motivasi, serta doa, yang selalu bersabar menunggu Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S1 ini.
11. Sahabat-Sahabat Siyash D-2017, yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya, yang tetap solid dan saling mendukung dalam menyelesaikan Pendidikan S1 ini.
12. Sahabat-Sahabat LPP yang memberikan dukungan dan berbagi Informasi hukum, semoga ilmu dan gelar yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang banyak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kajian Terdahulu.....	14
E. Kerangka Teori.....	16
F. Hipotesis.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PSBB DALAM PP NO. 21	
TAHUN 2020	23
A. Pengertian Kebijakan.....	23
B. Bentuk Kebijakan Pemerintah.....	29
C. Analisis Pembentukan Kebijakan PSBB (PP No.21 tahun 2020).....	34

**BAB III : PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.21 TAHUN
2020 DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG**

UNDANGAN.....	40
A. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan	40
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah	51
C. Substansi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Di Tinjau Dari Teknik Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.....	56
D. Implikasi Penataan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 dalam menangani Pandemic covid-19 pada tahun 2020.....	70

**BAB IV : ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PP NO 21 TAHUN 2020**

A. Pembentukan Aturan Hukum dalam Teori <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> teori <i>Al-sulthah al-Tasri'iyah</i>	81
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB	90

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA.....

103